



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 1 April 2024
Waktu	: 13.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023; 2. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Kapala BNPB dan jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi oleh para Wakil Ketua H. Abdul Wachid., H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas "Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu Aktual" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan tentang realisasi Anggaran BNPB Tahun 2023 sebesar Rp5.435.168.423.433,- (*Lima Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) atau 99,16% dari Pagu Anggaran BNPB Tahun 2023 sebesar Rp5.481.143.903.000 (*Lima Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
I	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	<b>299.441.660.000</b>	<b>294.358.138.159</b>	<b>98,30%</b>
1	SEKRETARIAT UTAMA	271.583.818.000	266.894.650.760	98,27%
2	INSPEKTORAT UTAMA	13.000.000.000	12.993.867.591	99,96%
3	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	14.857.842.000	14.469.619.808	97,56%
II	<b>PROGRAM KETAHANAN BENCANA</b>	<b>5.181.702.243.000</b>	<b>5.140.810.285.274</b>	<b>99,34%</b>
1	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	65.527.000.000	65.429.898.961	99,87%
2	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	144.909.300.000	119.310.874.696	82,38%
3	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	4.733.880.689.000	4.727.482.122.288	99,86%
4	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	20.550.000.000	20.541.564.296	99,95%
5	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	23.000.000.000	22.978.221.795	99,99%
6	PUSAT DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN	150.698.748.000	144.300.246.568	95,75%
7	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI	43.136.506.000	40.767.356.670	94,51%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>5.481.143.903.000</b>	<b>5.435.168.423.433</b>	<b>99,16%</b>

2. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Memperkuat peran kelembagaan BNPB agar tidak tumpang tindih dengan program kementerian/lembaga lainnya termasuk dengan pemerintah daerah;
  - b. Agar penanganan Karhutla tidak lagi memakai hujan buatan untuk meminimalisir kerusakan tanaman produktif masyarakat;

- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana termasuk mempermudah akses untuk pengajuan bantuan bencana;
- d. Program pencegahan bencana harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi resiko daerah terdampak bencana termasuk menghindari jatuhnya banyak korban;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan logistik kebencanaan di daerah rawan bencana.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,

  
DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si